



KADIN INDONESIA

MATERI

SEMINAR NASIONAL *FEED THE WORLD*



Untuk lebih memfokuskan pembahasan, dalam Seminar Nasional Feed The World, maka materi utama bahasan Seminar adalah Road Map Ketahanan Pangan Nasional jangka pendek 2009 – 2014 dan jangka panjang 2009 – 2030 Kadin Indonesia. Disamping itu, agar dalam tahap implementasi program tidak mengalami kendala berarti, maka dalam kesempatan Seminar ini dimintakan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat lebih memperkaya dan memberi motivasi agar kita semakin fokus dan dapat menetapkan strategi program dan kegiatan yang baik untuk melaksanakan swasembada menuju ketahanan pangan nasional. Selain itu, dimintakan pula solusi atas berbagai kendala dan hambatan yang perlu segera dituntaskan. Lebih dari itu, dalam kesempatan Seminar ini akan dimintakan komitmen dari seluruh para pemangku kepentingan (stakeholders), terutama pemerintah agar secara konsisten dapat mengimplementasikan dan mewujudkan program ketahanan pangan nasional.

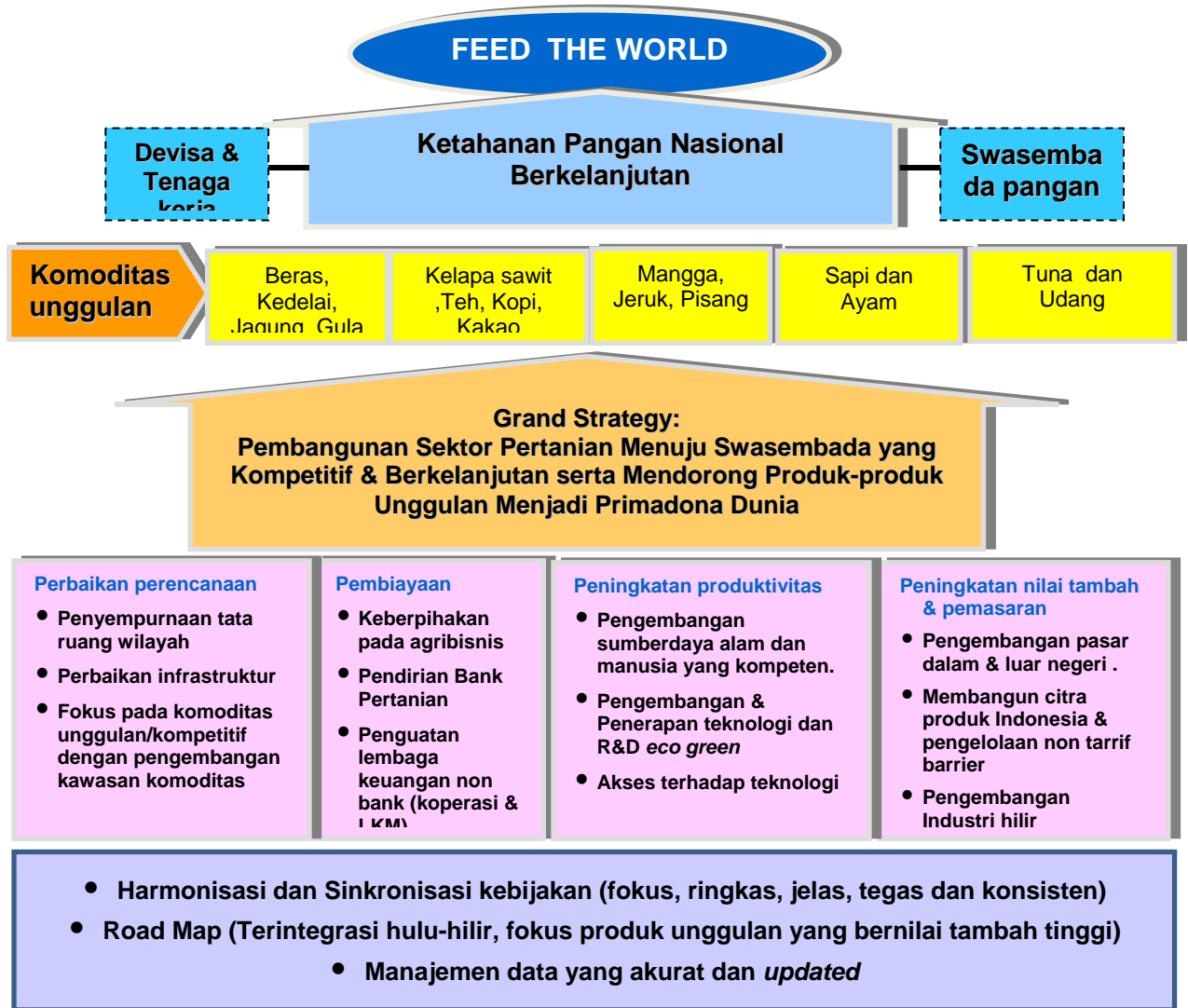
KRISIS PANGAN: TANTANGAN DAN KESEMPATAN

- ❑ Harga pangan di pasar dunia mengalami kenaikan pesat akhir-akhir ini. Kenaikan harga tersebut diyakini bukan semata-mata fenomena temporer. Peningkatan penggunaan pangan untuk energi menyebabkan kenaikan harga pangan diperkirakan akan terus berlanjut.
- ❑ Kenaikan harga pangan mengancam pemenuhan kebutuhan manusia yang paling dasar, meningkatkan instabilitas politik dan ekonomi, dan menghambat pengentasan kemiskinan di banyak negara. Menurut laporan *Food and Agriculture Organization* (FAO), 923 juta penduduk dunia mengalami kekurangan pangan pada 2007, meningkat lebih dari 80 juta sejak periode 1990-1992.
- ❑ Kenaikan harga seyogyanya dapat mendorong negara produsen meningkatkan produksi, untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan memasok kebutuhan dunia. Kesempatan ini selayaknya dapat mendorong pemanfaatan potensi dan sumberdaya secara optimal bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan negara.
- ❑ Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan maritim: memiliki lahan pertanian yang luas, iklim dan curah hujan yang cocok dan tenaga kerja cukup. Indonesia juga memiliki pesisir pantai yang panjang (sekitar 81.000 km), lautan luas dan jenis ikan yang beragam. Iklim tropis Indonesia memungkinkan reproduksi ikan tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.
- ❑ Memperhatikan tingkat produksi saat ini, produksi pangan di Indonesia masih dapat ditingkatkan sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih kokoh dan berperan lebih besar pada penyediaan pangan dunia.

KENDALA PEMBANGUNAN SEKTOR PANGAN

- ❑ **Ketersediaan lahan**
Konversi lahan dan degradasi mutu lahan menyebabkan lahan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan semakin sempit. Perluasan lahan terhambat oleh tata ruang dan peruntukan lahan yang tidak jelas dan tumpang tindih.
- ❑ **Infrastruktur pendukung produksi dan pemasaran**
Sarana jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air dan Jaringan irigasi kurang memadai.
- ❑ **Teknologi dan akses terhadap teknologi**
Kegiatan R&D kurang terkoordinasi dan tidak terintegrasi.
Penggunaan input produksi (benih, pupuk, dan alat & mesin pertanian) tidak optimal; pasokan input terbatas; dan harga input tidak terjangkau;
Teknik budi daya kurang berkembang dan teknologi pasca panen serta pengolahan tidak efisien.
- ❑ **Pembiayaan**
Perbankan cenderung menghindari pembiayaan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dianggap beresiko tinggi. Tingkat bunga tidak kompetitif.
- ❑ **Iklim Usaha / Investasi**
Kebijakan fiskal (PPN, bea masuk, pajak ekspor dan insentif) tidak mendukung usaha pertanian. Terdapat berbagai peraturan pusat dan daerah yang tidak kondusif bagi investasi.
- ❑ **Diversifikasi pangan**
Ketergantungan konsumsi pada beras sangat tinggi (tidak ada insentif untuk diversifikasi). Akses dan kebiasaan konsumsi pangan berkualitas (gizi, protein, dan karbohidrat) sangat rendah.
Tidak ada kepastian pemanfaatan (jenis dan kuantitas) komoditas pangan untuk energi alternatif.

KERANGKA STRATEGI PERTUMBUHAN



ROADMAP PEMBANGUNAN SEKTOR PANGAN

Mewujudkan dua misi pembangunan sektor pangan yaitu mencapai:

- (1) **Swasembada** pangan berkelanjutan ;
- (2) Peningkatan daya saing komoditas pangan domestik;

Dengan menggunakan 7 (tujuh) kebijakan strategis:

- (1) Membuka peluang lebih besar bagi perluasan areal pertanian termasuk ladang penggembalaan dan lahan budidaya ikan;
- (2) Meningkatkan penyediaan infrastruktur (jaringan irigasi, jalan dan pelabuhan);
- (3) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk, benih unggul dan saprotan;
- (4) Meningkatkan akses petani dan pengusaha kepada lembaga keuangan formal dan dukungan pendanaan bagi petani dan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- (5) Revitalisasi industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- (6) Keberpihakan kebijakan perdagangan pada produksi pangan domestik;
- (7) Mendorong kegiatan R&D oleh pemerintah dan perusahaan.

Difokuskan pada:

- (1) 4 (empat) komoditas pangan strategis ;
- (2) 6 (enam) komoditas unggulan ekspor ;
- (3) 2 (dua) komoditas pendukung perbaikan gizi ;
- (4) 3 (tiga) komoditas buah-buahan lokal populer.

FOKUS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PANGAN

FOKUS PADA 15 KOMODITAS PANGAN

Prioritas pada 10 komoditas strategis dan unggulan ekspor

Empat komoditas pangan strategis

(kebutuhan pokok penduduk dan dibutuhkan dalam jumlah besar):

Beras, Jagung, Kedelei, dan Tebu gula

Enam komoditas pangan andalan ekspor:

Kelapa Sawit, Teh, Kopi, Kakao, Udang dan Tuna.

Dua komoditas ternak pendukung perbaikan gizi masyarakat: Sapi dan Ayam

Tiga komoditas buah lokal terpopuler: Mangga, Pisang dan Jeruk

TARGET PEMBANGUNAN SEKTOR PANGAN

1. Pencapaian swasembada pangan berkelanjutan

TARGET PRODUKSI BAHAN PANGAN PENTING 2010 - 2020 (JUTA TON)

Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beras	34.9	35.7	36.4	37.1	37.9	38.6	39.4	40.2	40.9	41.7	42.5
Jagung	16.5	17.3	18.2	19.1	20.0	20.9	21.9	22.8	23.8	24.8	25.8
Kedelei	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5
Gula	37.9	41.3	42.9	44.4	48.0	49.6	51.3	55.1	56.8	58.5	60.2
<i>Gula tebu</i>	3.3	3.8	4.0	4.3	4.7	5.0	5.3	5.9	6.2	6.5	6.9
<i>Gula rafinasi</i>	1.5					2.1					3.2
CPO	23.6	26.0	28.5	31.1	33.8	36.6	39.5	42.5	45.7	48.9	52.3
Teh (000 ton)	154.5	155.9	157.3	158.6	160.0	161.4	162.8	164.1	165.5	166.9	168.3
Kopi (000 ton)	754.1	774.3	794.7	815.4	836.3	857.5	878.9	900.5	922.4	944.5	966.9
Kakao (000 ton)	855	886	917	948	980	1,011	1,043	1,074	1,106	1,138	1,170
Perikanan	11.26	12.40	13.59	15.14	17.07	17.65	18.26	18.89	19.56	20.27	21.0
Tangkap	5.38	5.41	5.44	5.47	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.5
Budidaya	5.88	6.99	8.15	9.67	11.57	12.15	12.76	13.39	14.06	14.77	15.5
Daging	2.20	2.28	2.37	2.46	2.58	2.72	2.91	3.07	3.26	3.48	3.73
Telur	1.51	1.57	1.65	1.72	1.79	1.84	1.92	1.99	2.08	2.19	2.31
Susu	0.73	0.85	0.99	1.13	1.30	1.50	1.63	1.69	1.76	1.84	1.92

Pada 2020 seluruh kebutuhan pangan domestik terpenuhi oleh produksi sendiri

KONSUMSI PANGAN DAN PENGGUNAAN PANGAN UNTUK ENERGI DI DALAM NEGERI 2010-2020

(JUTA TON)

Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beras	34.5	34.9	35.3	35.7	36.1	36.5	36.8	37.2	37.6	37.9	38.2
Jagung	14.4	14.5	14.7	14.9	15.1	15.2	15.4	15.5	15.7	15.8	16.0
Kedelei	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3
Gula konsumsi	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3
CPO	7.5	8.6	9.8	11.1	12.4	13.9	15.4	17.0	18.7	20.5	22.4
<i>Migor</i>	6.0	6.1	6.3	6.5	6.7	6.9	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0
<i>Lainnya *)</i>	1.6	2.5	3.5	4.5	5.7	6.9	8.2	9.6	11.1	12.7	14.4
Teh (000 ton)	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
Kopi (000 ton)	304	308	312	315	319	322	325	328	332	335	338
Kakao (000 ton)	328	332	336	339	343	347	350	354	357	360	364
Ikan	6.6	6.8	7.0	7.3	7.5	7.7	8.0	8.2	8.5	8.8	9.0
Daging	1.56	1.62	1.68	1.75	1.83	1.93	2.02	2.13	2.23	2.35	2.46
Telur	1.35	1.40	1.46	1.52	1.58	1.64	1.71	1.77	1.84	1.91	1.98
Susu	2.81	2.92	3.04	3.17	3.29	3.43	3.56	3.70	3.84	3.99	4.15

*) termasuk kebutuhan untuk energi (biodiesel dan etanol)

Catatan: kebutuhan domestik per kapita per tahun: beras = 147 kg, jagung pangan= 22.2kg, jagung non-pangan=39.7kg; kedelai 7.6 kg, gula konsumsi langsung = 12 kg, CPO Migor 17.7kg, CPO lainnya 12.2 kg, teh, kopi dan kakao masing-masing 0.4, 1.3 dan 1.4 kg, ikan 28 kg.

2. Peningkatan daya saing produk pangan Indonesia

TARGET PENERIMAAN DEvisa PRODUK PANGAN UNGGULAN EKSPOR 2010 - 2014

(JUTA US\$)

Komoditas	2010	2011	2012	2013	2014	2010 - 14
CPO	13,947.1	15,040.4	16,159.7	17,304.0	18,471.7	80,922.9
Teh	90.8	91.2	91.6	92.1	92.6	458.4
Kopi	950.4	985.4	1,021.1	1,057.5	1,094.4	5,108.8
Kakao	1,173.5	1,231.3	1,289.1	1,347.1	1,405.2	6,446.2
Udang	1,237.8	1,290.4	1,343.2	1,396.3	1,449.5	6,717.3
Tuna/Cakalang/Tongkol	340.4	358.6	377.3	396.4	415.8	1,888.6
Total	17,740.1	18,997.4	20,282.2	21,593.2	22,929.2	101,542.1

Penerimaan devisa enam komoditas andalan ekspor diperkirakan mencapai **US\$ 101,5 milyar** selama 2010-2014 (**US\$ 81 milyar** diantaranya berasal dari ekspor CPO).

KETERSEDIAAN LAHAN

Penggunaan lahan

Penggunaan Lahan	Luas	%
Total luas daratan	187,913	100
Hutan	110,842	59,0
Kawasan Suaka - Pelestarian Alam (KSA-KPA)	19,876	10,6
Hutan Lindung (HL)	30,052	16,0
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	25,656	13,7
Hutan Produksi (HP)	35,259	18,8
APL & HPK	77,071	41,0
Hutan Produksi Konversi (HPK)	22,732	12,1
Pertanian	30,727	16,4
Perkebunan	16,635	8,9
Lain-lain	6,977	3,7

Lahan potensial untuk pertanian

Kondisi lahan	Luas (juta ha)
Potensial untuk pertanian	100,7
Lahan basah sawah	24,5
<i>Sawah tercetak</i>	8,5
<i>Potensi perluasan</i>	16,0
<i>Lahan rawa</i>	3,5
<i>Non rawa</i>	12,5
Lahan kering	76,2
<i>Tanaman semusim</i>	25,3
<i>Tanaman tahunan</i>	50,9

- Dari 188 juta ha luas daratan Indonesia, sekitar 100 juta hektar secara biofisik (fisiografi, bentuk wilayah, lereng dan iklim) cocok untuk kegiatan pertanian. Akan tetapi sebagian besar sumber daya lahan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
- Masih tersedia sekitar 16 juta ha lahan untuk perluasan lahan sawah dan sebagian besar di antaranya (12,5 juta ha) lahan non-rawa yang berpotensi berproduktivitas tinggi.
- Penggunaan lahan untuk kegiatan produktif pertanian di lahan kering baru sekitar 54 juta hektar.
- **Areal Kawasan Hutan seluas 111 juta Ha dimungkinkan untuk dibangun hutan tanaman sebagai sumber bahan baku industri pulp. Apabila 15 juta Ha saja dikembangkan sebagai hutan tanaman pendukung industri pulp & kertas, maka tahun 2030 akan menghasilkan 60 juta ton pulp equivalen dengan perolehan devisa US \$ 50 Milyar.**

KEBUTUHAN LAHAN

Komoditas	2008	2020	Keterangan
Areal panen			
Padi	12,3 juta Ha	13,6 juta Ha	Bila seluruh jaringan irigasi yang ada dapat diperbaiki, peningkatan luas areal panen dapat dicapai dengan peningkatan Indeks Pertanaman.
Jagung	3,6 juta Ha	4,3 juta Ha	
Kedelai	591 ribu Ha	1 juta Ha	Selain meningkatkan Indeks Pertanaman, diperlukan penambahan lahan perkebunan kedelai sekitar 200 ribu Ha.
Perkebunan			
Tebu	445 ribu Ha	744,5 ribu Ha	Kebutuhan lahan 2020 termasuk perkebunan tebu untuk pemenuhan kebutuhan produksi gula mentah (<i>raw sugar</i>) bahan baku PG rafinasi
Kelapa Sawit	7 juta Ha	12 juta Ha	
Teh	130 ribu Ha	130 ribu Ha	
Kopi	1,3 juta Ha	1,5 juta Ha	
Kakao	1,5 juta Ha	1,5 juta Ha	
Budidaya ikan	1 juta Ha	4 juta Ha	Luas lahan budidaya dan infrastruktur perikanan

KETERSEDIAAN LAHAN DAN TATA RUANG WILAYAH

- Indonesia dengan luas daratan 188 juta hektar yang terdiri dari kawasan hutan, kawasan non hutan yang dan hutan konversi. Kawasan hutan tersebut merupakan kawasan yang perlu dijaga kelestariannya untuk kepentingan nasional maupun dunia.
- Kawasan non hutan dan hutan konversi dapat dikelola / dimanfaatkan dengan baik, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui forest management, dan Indonesia akan dapat meningkatkan swasembada pangan dan bahkan berkontribusi bagi dunia baik pangan maupun turut menjaga perubahan iklim dengan hutan yang lestari.
- Penataan Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi sangat penting untuk memungkinkan forest management dapat dilakukan secara lestari, sehingga luasan areal antara areal hijau / hutan dan areal produktif yang bisa dikelola sebagai areal pertanian, perkebunan, perikanan dll, dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
- Tata Ruang Wilayah Nasional saat ini sangat kompleks karena berbagai peraturan perundangan berlaku saling tumpang tindih. Perlu segera dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundangan tersebut, dan penataan yang terintegrasi agar tetap memenuhi forest managemen dan asas pemanfaatan areal / lahan untuk kesejahteraan masyarakat.
- BKPRN yang dibentuk berdasarkan Kepres No. 4 / 2009 dibawah pimpinan / koordinasi Menko Perekonomian, perlu diberikan wewenang penuh dalam penetapan Tata Ruang Wilayah baru.
- BKPRN menginventarisasi kembali Tata Ruang Wilayah Nasional dengan data citra landsat yang terbaru, sehingga dapat diperoleh data area yang masih hutan maupun area yang sudah terbuka.
- Sambil menunggu selesainya proses tata ruang wilayah yang baru, diharapkan moratorium proses hukum dihentikan karena adanya perbedaan penafsiran antara pusat dan daerah.

PROPOSAL RENCANA AKSI

Isu Pokok	Output yang diharapkan	Rencana Aksi
Tata Ruang Wilayah & Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia lahan cukup bagi perluasan areal pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. • Kepastian dan konsistensi peruntukan lahan (tidak berubah-ubah, konsisten antar instansi dan antara pusat dan daerah). • Kemudahan proses pemanfaatan lahan untuk keperluan pengembangan kawasan komoditas pertanian. • Kepastian dan jaminan atas hak kepemilikan tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau kembali aturan perundangan yang menghambat investasi di sektor pangan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kep. Ka BPN No. 2/2003 tentang Norma dan Standar Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota; 2. PerMen Agraria/Kepala BPN No. 2/1999 tentang Izin Lokasi (Ps 4 ayat (1)d); 3. UU No.26 tahun 2007 dan PP No. 26 tahun 2008 mengenai Rencana tata Ruang Nasional; 4. Permen Pertanian dan Agraria No. 2 / 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia atas Tanah (Ps. 3) ; 5. Permen Dalam Negeri No. 6/1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak atas Tanah (Ps. 11) ; 6. UU No .41/1999 tentang Kehutanan dan perubahannya pada Perpu No. 1/2004 ; 7. PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan ; 8. Berbagai peraturan daerah yang menghambat pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. • BKPRN menyusun Perpu pengganti UU No.26/2007 dan UU No.41/1999 untuk sinkronisasi dan harmonisasi Tata Ruang Wilayah. • Menyesuaikan semua peraturan perundangan dengan UU No. 32/2004 tentang OTDA dan PP No. 38/2007. • Sertifikasi lahan / kebun rakyat melalui PRONA dan didanai dari APBN. • Penyelarasan peruntukan lahan antara Tata Ruang Daerah (propinsi dan kabupaten/kota) dengan Tara Ruang Nasional; • Penyederhanaan proses memperoleh HGU, dan legitimasi HGU atau hak kepemilikan tanah lainnya. • Mencabut / membatalkan izin lokasi yang tidak digunakan (batas kedaluarsa 3 tahun); • Kepastian hukum penyelesaian konflik dengan hak adat dan ulayat.

Isu Pokok	Output yang diharapkan	Rencana Aksi
Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Peta/data kondisi aktual terbaru posisi kawasan hutan dan non kawasan hutan berdasarkan vegetasinya 	<ul style="list-style-type: none"> BPKRN yang dibentuk oleh presiden dengan ketua menko perekonomian perlu ditingkatkan efektivitasnya dengan tanggung jawab dan kewenangan penuh yang dimiliki untuk penanganan tata ruang wilayah termasuk perubahan fungsi kawasan hutan, untuk menghindari ego sektoral. Meningkatkan peran koordinasi dan tugas BKPRN sesuai Kepres No. 4 / 2009 : <ul style="list-style-type: none"> Penyiapan kebijakan penataan ruang nasional; Penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang, baik ditingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya; Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang termasuk standar, prosedur dan kriteria; Pemaduserasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang; Pemaduserasian penatagunaan sumber daya alam lainnya dengan rencana tata ruang; Melakukan inventarisasi menggunakan citra landsat terbaru : <ul style="list-style-type: none"> Kawasan hutan → berhutan vs tidak berhutan Kawasan non hutan → sudah dimanfaatkan vs belum dimanfaatkan, berhutan dan tidak berhutan.
	<ul style="list-style-type: none"> Kelancaran arus barang dari sentra produksi ke pasar domestik dan ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> Insentif fiskal bagi pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan) oleh swasta Perluasan kapasitas pelabuhan ekspor (terutama Dumai dan Belawan) Pembangunan pelabuhan ekspor baru di Indonesia Bagian Timur Perbaikan jaringan irigasi: seluruh jaringan irigasi dapat berfungsi optimal pada 2014; Penyediaan sistem & fasilitas pengangkutan <i>consolidated container</i> dan <i>refrigerated container</i> Penggantian lahan pertanian akibat pengembangan infrastruktur jalan tol.

Isu Pokok	Sasaran	Rencana Aksi
Teknologi / Akses Teknologi dan Diversifikasi Pangan	Tersedia dana memadai bagi kegiatan R&D, efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan integrasi kegiatan R&D antar instansi pemerintah dan swasta;
		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dana pemerintah lebih besar bagi tunjangan fungsional peneliti dan penelitian di sektor pangan.
		<ul style="list-style-type: none"> Insentif pajak bagi kegiatan penelitian (di bidang benih, teknik budidaya, dll) oleh swasta, sesuai PP No. 35 tahun 2007
	Benih / Bibit dan saprotan lebih terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> Surat edaran Menteri keuangan (Juknis) untuk penggunaan langsung hasil kerja sama riset dalam rangka pelaksanaan PP No. 20 tahun 2005
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Plasma Nutfaq Kelapa Sawit, padi, jagung, kedelai, bibit sapi, bibit ayam, bibit udang, dll.
		<ul style="list-style-type: none"> Mempermudah proses sertifikasi benih
		<ul style="list-style-type: none"> Membangun sistem waralaba benih berbantuan
		<ul style="list-style-type: none"> Penghapusan pajak dan bea masuk alsintan / sarana produksi.
		<ul style="list-style-type: none"> Subsidi benih / bibit bagi petani, Pembebasan PPN atas benih.
		<ul style="list-style-type: none"> Subsidi pupuk bagi petani kecil termasuk petani perkebunan dan subsidi atas penggunaan pupuk organik.
Teknologi / Akses Teknologi pasca panen dan pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Penataan kembali sistem distribusi benih / bibit, pupuk bersubsidi. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, peternakan & perikanan: <ul style="list-style-type: none"> Audit teknologi dan efisiensi pabrik gula. Dukungan pendanaan bagi peremajaan mesin dan peralatan pabrik pengolah hasil pertanian., perkebunan, peternakan dan perikanan. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan insentif bagi pembangunan industri hilir pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Penataan kelembagaan industri primer pada satu departemen pemerintah.

Isu Pokok	Sasaran	Rencana Aksi
Teknologi / Akses Teknologi dan Diversifikasi Pangan	Konsumsi pangan non beras meningkat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan promosi diversifikasi pangan non beras;
	Kepastian kuantitas dan jenis pangan untuk energi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan kebutuhan komoditas pangan (jenis, kuantitas dan subsidi) yang akan digunakan untuk energi.
Pembiayaan dan Iklim Usaha / Investasi	Tersedia dana cukup untuk investasi dengan tingkat bunga bersubsidi	<ul style="list-style-type: none"> • Bank khusus untuk pembiayaan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga penjaminan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan • Skema kredit khusus bagi usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan (tingkat bunga bersubsidi); • Mempermudah prosedur pemberian kredit kepada petani, nelayan, petambak dan peternak • Skema pendanaan khusus untuk pengadaan alsintan
	Kebijakan perdagangan berpihak pada produksi dan pengolahan pangan domestik dan ekspor	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan skema WTO untuk perlindungan non-tarif atas produk pangan domestik dan ekspor.
		<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan pasokan feedstock bagi dalam negeri (eg. jagung untuk pakan ternak) • Fleksibilitas kebijakan tarif bea masuk komoditas pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
Pajak ekspor digunakan untuk kepentingan petani dan konsumen domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan pajak ekspor oleh asosiasi industri terkait untuk kegiatan penelitian, promosi dan membangun citra positif produk pangan Indonesia. • Pengalokasian sebagian dana Pajak Ekspor untuk perbaikan infrastruktur di daerah penghasil dan dan untuk stabilisasi harga di pasar domestik. 	

Berkenaan dengan seluruh materi yang akan dibahas serta capaian harapan yang diinginkan dari penyelenggaraan Seminar ini, maka akan ditampilkan para pembicara dan nara sumber:

- ❖ Presiden Republik Indonesia
- ❖ Ketua DPR RI
- ❖ Dirjen FAO
- ❖ World Bank for East Asia and Pacific
- ❖ Para Menteri terkait
- ❖ Kepala BKPM
- ❖ Kepala BPN
- ❖ Para Gubernur dan Bupati terkait
- ❖ Gubernur Bank Indonesia
- ❖ Direktur Bank BUMN dan Bank Swasta

MATERI BAHASAN AKAN DIBAGI DALAM 4 PANEL DISKUSI DENGAN TOPIK SEBAGAI BERIKUT :

1. Panel Diskusi 1 : Pengaturan Tata Ruang dan penyediaan infrastruktur untuk swasembada pangan
2. Panel Diskusi 2 : Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan untuk Menjamin Kepastian Usaha di Sektor Pangan
3. Panel Diskusi 3 : Kebijakan pendanaan dan investasi bagi pertanian, perkebunan dan investasi bagi pertanian dan perikanan beserta industri pengolahan dan industry penunjang.
4. Panel Diskusi 4 : Kebijakan perindustrian, perdagangan dan teknologi yang mendukung Feed The World.